

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Pembangunan Ekonomi Lokal di Indonesia menjadi hal yang sangat menarik. Saat pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu dengan kebijakan dan otoritas pusat, yang mana pertumbuhan ekonomi didorong dengan berbagai kebijakan yang berfokus pada subsidi, pembebasan pajak, dan penyediaan infrastruktur murah dalam rangka menarik investasi. Namun, berbagai kebijakan tersebut ternyata berpihak pada industri besar dan konglomerat yang menimbulkan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Hal tersebut menyebabkan pondasi perekonomian Indonesia menjadi rapuh ditambah lagi dengan terjangan krisis moneter 1997 dan kondisi perbankan nasional.

Kondisi saat ini, daerah-daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Dari segi perekonomian masih dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, persaingan pasar di tengah arus globalisasi, timbulnya ancaman dan peluang, serta disparitas pendapatan. Timbulnya permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk memanfaatkan pembangunan ekonomi lokal sebagai pendekatan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya penekanan dan kekuatan yang datang untuk memobilisasi sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu kekuatan utama dalam kemandirian dan keberlanjutan yang menjadi fondasi sistem perekonomian Indonesia. Kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan, terutama dengan mengingat keunggulan demografi Indonesia saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa proporsi usia produktif Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2010 menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mencapai 65,5 juta pada tahun 2023, mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, usaha mikro mendominasi dengan porsi sebesar 97 persen, diikuti oleh usaha kecil sebanyak 2 persen, dan usaha menengah sebesar 1 persen. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat mencapai 61 persen, atau sekitar Rp9.580 triliun, yang mencerminkan peningkatan sebesar 2,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, UMKM juga menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, menandakan perannya yang krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat fondasi ekonomi negara secara berkelanjutan.

Wilayah DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan juga berupaya untuk memperkuat sektor UMKM. Hal ini juga disebabkan kondisi UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Berdasarkan jumlahnya, UMKM wilayah DKI tercatat sebanyak unit, dan yang tersebar di Jakarta Barat 43.201, Jakarta Timur 50.880, Jakarta Selatan 67.208, Jakarta Utara 39.398, Jakarta Pusat 34.717, dan Kepulauan Seribu 3.496. Pelaku UMKM tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya seperti bidang kuliner sebanyak 167.986 UMKM, bidang fesyen 18.181 UMKM, bidang kerajinan tangan sebanyak 8.275 UMKM, dan bidang lainnya 49.530 UMKM.

Tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, khususnya dalam memperkuat sistem perekonomian nasional. Meskipun pembinaan usaha kecil didorong untuk dapat meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, realitanya proses ini masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan yang umum dijumpai diantaranya dalam bidang manajemen dan organisasi, keterbatasan teknologi, terbatasnya akses pasar, kesulitan memperoleh perizinan, serta biaya non-teknis lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM meliputi persaingan usaha sebesar 37,14%, keterbatasan modal 27,44%, kendala pemasaran 15,62%, ketersediaan bahan baku 7,36%, permasalahan tenaga kerja 2,88%, pungutan liar 2,77%, regulasi pemerintah 1,94%, serta keterbatasan infrastruktur sebesar 1,89 %.

Guna memfasilitasi tantangan tersebut sekaligus sebagai bentuk pembinaan terhadap UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan Jakpreneur

yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang bertujuan untuk (1) Menumbuhkembangkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta, (2) Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, (3) Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha, (4) Meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM, (5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan (6) Mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Program Jakpreneur menjadi hasil pengembangan dan penyempurnaan dari program sebelumnya, yakni OKE OCE atau *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship*, kemudian berganti nama menjadi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), hingga akhirnya dikenal dengan nama Jakpreneur. Program ini dirancang sebagai wadah fasilitasi, platform kreasi, dan ruang kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan usaha melalui keterlibatan komunitas kewirausahaan, lembaga pembiayaan, institusi pendidikan, dan pelaku usaha rintisan (*start-up*). Jakpreneur menyasar berbagai kelompok sasaran, mulai dari masyarakat

umum, pengusaha pemula, pencari kerja, dan wirausaha naik kelas. Dalam pelaksanaannya, program ini dapat berbentuk kolektif baik dalam jangka menengah maupun panjang, atau diwujudkan dalam berbagai bentuk praktik kewirausahaan lainnya. Tujuan utamanya adalah membentuk pelaku usaha yang mandiri dan memiliki keterampilan melalui pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat, lembaga pendamping, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Program ini menawarkan tujuh fasilitas lain yang dapat dinikmati para pendaftar Jakpreneur. Tujuh fasilitas itu yakni: pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan akses permodalan. Pelatihan yang ditawarkan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya, kegiatan ini memiliki sasaran kepada pelaku UMKM atau individu mengenai pembekalan ilmu dasar untuk memulai bisnis mereka. Selain itu, peserta Jakpreneur juga memperoleh akses terhadap program akselerator dan inkubator bisnis. Selama rangkaian program Jakpreneur, para anggota juga didampingi oleh tenaga ahli dan mentor dalam pengembangan usaha. Pelaku UMKM juga diajarkan pemahaman dasar terkait keuangan dan perencanaan anggaran, sehingga bisa lebih maksimal dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, para UMKM juga diberi dukungan dalam menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses pasar dan pendanaan. Dalam mendukung aspek pemasaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan bazar di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Sedangkan untuk akses permodalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi proses pengajuan pembiayaan melalui sistem e-Form yang terintegrasi dengan Bank DKI, disertai

pendampingan serta pelatihan agar pelaku UMKM dapat memahami prosedur dan kelayakan pengajuan pinjaman dengan baik.

Program Jakpreneur dijalankan oleh lima perangkat daerah di tingkat provinsi (Dinas Pengampu) dan Suku Dinas Kota Administratif di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun sistem basis data yang terintegrasi dalam mengelola informasi terkait pelaku usaha dan binaan program. Berdasarkan data pada laman resmi Jakpreneur (<https://jakpreneur.jakarta.go.id/index>), tercatat sebanyak 416.680 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem hingga Desember tahun 2025. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam program ini. Dengan cakupan peserta yang luas, diharapkan Jakpreneur dapat menjadi ekosistem kolaboratif yang mendorong kreativitas dan inovasi, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Peserta Jakpreneur DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Jumlah Usaha Peserta Jakpreneur	
		2024	2025
1.	Jakarta Pusat	38.786	40.371
2.	Jakarta Utara	42.273	44.125
3.	Jakarta Barat	53.284	55.557
4.	Jakarta Selatan	78.982	91.276
5.	Jakarta Timur	56.790	59.815
6.	Kepulauan Seribu	3.627	3.685
Total		294.829	

Sumber : Laporan Mingguan Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Tabel di atas menunjukkan kondisi jumlah usaha yang dimiliki oleh peserta Jakpreneur. Berdasarkan data periode tahun 2024 hingga Agustus 2025, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun program Jakpreneur sempat mengalami penurunan partisipasi pada beberapa tahapan, tetapi terdapat dinamika positif dalam hal pertumbuhan jumlah usaha yang dijalankan peserta.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah administratif dengan pendaftar dan jumlah usaha tertinggi dengan jumlah usaha Jakpreneur sebanyak 91.276. Wilayah Jakarta Selatan menaungi 10 kecamatan, yaitu Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis dalam implementasi program Jakpreneur. Namun demikian, masih terdapat disparitas dalam hal akses pelatihan, pemasaran, dan permodalan dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat potensi besar yang dimiliki wilayah ini sekaligus tantangan yang dihadapi dalam membina pelaku UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Tabel 1. 2 Data Jakpreneur (2018-2025)

No.	Program	Jumlah Partisipan
1.	Pendaftaran (P1)	401.738
2.	Pelatihan (P2)	243.628
3.	Pendampingan (P3)	223.828
4.	Perizinan (P4)	235.616
5.	Pemasaran (P5)	65.515
6.	Pelaporan Keuangan (P6)	67.155
7.	Permodalan (P7)	18.311

Sumber : Laporan Mingguan Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat data kumulatif program Jakpreneur periode 2018-2025 yang menunjukkan beberapa temuan kritis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terlihat disparitas yang signifikan antara tingkat partisipasi pada tahap pendaftaran (401.738 partisipan) dengan tahap implementasi program. Sebagai contoh, hanya 243.628 partisipan (60,6%) yang melanjutkan ke tahap pelatihan, dan angka ini semakin menurun pada tahap pendampingan (223.828 partisipan). Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah dalam retensi peserta selama proses pembinaan berlangsung.

Permasalahan utama terlihat pada tahap permodalan yang hanya diakses oleh 18.311 partisipan (4,5% dari total pendaftar). Jika mengacu pada data BPS (2023), sekitar 27,44% UMKM di DKI Jakarta mengidentifikasi kesulitan permodalan sebagai kendala utama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Beberapa faktor yang mungkin

menjadi penyebab antara lain persyaratan yang terlalu ketat, kurangnya sosialisasi, atau ketidaksesuaian mekanisme pembiayaan dengan karakteristik UMKM binaan.

Tabel 1. 3 Data Jakpreneur tahun 2023 dan 2024

No.	Program	Jumlah Partisipan	
		2023	2024
1.	Pendaftaran (P1)	29.707	19.338
2.	Pelatihan (P2)	48.515	41.617
3.	Pendampingan (P3)	20.585	7.062
4.	Perizinan (P4)	247.702	11.616
5.	Pemasaran (P5)	20.911	13.593
6.	Pelaporan Keuangan (P6)	3,351	1.032
7.	Permodalan (P7)	1.514	126

Sumber : Data Mingguan Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Selanjutnya, Tabel 1.3 menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah partisipan Jakpreneur di tahun 2023 dan 2024 dengan penurunan sekitar 74,3%. Penurunan paling signifikan terlihat pada tahap perizinan usaha, yaitu dari 242.702 partisipan di tahun 2023 menjadi hanya 11.616 partisipan di tahun 2024, atau turun lebih dari 95%. Tahapan lain seperti permodalan juga mengalami penurunan ekstrem, dari 1.514 menjadi hanya 126 partisipan. Meskipun beberapa tahapan seperti pelatihan dan pemasaran mengalami penurunan yang tidak terlalu tajam, tren penurunan secara umum menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi peserta di seluruh siklus pembinaan Jakpreneur. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program, kualitas fasilitasi dari pihak

penyelenggara, serta kemungkinan hambatan yang dihadapi peserta dalam mengakses tahapan-tahapan tersebut secara berkelanjutan.

Tabel 1. 4 Jumlah Wirausahawan Baru Jakpreneur

No	Wilayah	2021			2022		
		Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur		Total per Wilayah	Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur		Total per Wilayah
		IKM	UKM		IKM	UKM	
1	Jakarta Pusat	2176	11.908	14.084	1294	5.177	6.471
2	Jakarta Utara	3167	6.654	9.821	925	3.701	4.626
3	Jakarta Barat	6852	6.417	13.269	1330	5.318	6.648
4	Jakarta Selatan	5.808	10.882	16.690	1.757	7.026	8.783
5	Jakarta Timur	5.734	10.945	16.679	1.666	6.665	8.331
6	Kepulauan Seribu	25	97	122	12	49	61
JUMLAH		23.762	46.903	70.665	6.984	27.936	34.920

Sumber : LKIP Dinas PPKUKM Tahun 2022

Melalui berbagai upaya yang sudah dilakukan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 200.000 peserta di awal peluncuran program. Saat ini jumlah pelaku usaha yang terdaftar Jakpreneur sebanyak 416.680 dengan 298.773 jumlah usaha per Desember 2025. Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan kewirausahaan baru di DKI Jakarta masih ditemukan permasalahan khususnya yang kerap dialami oleh program Jakpreneur. Diantaranya, adanya penurunan jumlah wirausaha baru pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Jumlah pertumbuhan kewirausahaan ini memang mencapai target yakni 34.920 dari 33.357 namun tidak menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan teori evaluasi Dunn, capaian ini mengindikasikan adanya masalah pada indikator efektivitas program, yakni ketidakmampuan program untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan dari jumlah pendaftar awal atau hasil akhir sebelumnya. Adanya penurunan partisipasi sebesar 74,3% di tahun 2024

memperlihatkan bahwa program belum mampu mempertahankan keberlanjutan manfaat bagi peserta.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku usaha menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) mendorong digitalisasi UMKM guna memperkuat daya saing ekonomi lokal. Digitalisasi tidak hanya memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong efisiensi operasional melalui penggunaan layanan keuangan digital dan platform e-commerce. Melalui program fasilitasi seperti Jakarta Entrepreneur dengan pendekatan 7 Langkah Pasti Akan Sukses (PAS) serta pelatihan e-Smart sebanyak 8.279 peserta, pelaku UMKM dibekali keterampilan dalam pemasaran digital, transaksi daring, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi. Selain itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan sektor swasta, memperkuat ekosistem wirausaha yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Dengan adanya pelatihan serta akses pendanaan yang lebih mudah, UMKM Jakarta diharapkan tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga memiliki daya saing di pasar nasional maupun global. Melalui penerapan QRIS dan mengintegrasikan UMKM dengan e-commerce menunjukkan bahwa sebanyak 29.844 dari 264.236 pelaku UMKM telah menerapkan QRIS Jakpreneur. Namun masih ditemukan juga keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses teknologi bagi beberapa pelaku usaha.

UMKM Jakpreneur binaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) turut berpartisipasi dalam The Jakarta International Handicraft Trade Fair sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya lokal. Acara ini melibatkan kreativitas dan daya saing yang dimiliki oleh pengrajin lokal. Acara ini juga menjadi peluang bagi para pelaku usaha kreatif Jakarta agar dapat lebih dikenal dan berkontribusi dalam memberikan citra dan rasa bangga terhadap produk Indonesia.

Peningkatan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal dicapai melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas skala usaha produktif yang dikelola baik secara individu maupun dalam bentuk koperasi, UMKM, dan IKM. Program Jakpreneur menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dalam mendorong UMKM naik kelas, tidak hanya dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan platform e-commerce untuk mempercepat digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM binaan serta pencapaian target wirausaha baru yang melampaui ekspektasi. Dengan adanya ekosistem yang mendukung, UMKM di Jakarta tidak hanya diharapkan mampu bertahan dalam perubahan ekonomi yang dinamis, tetapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Daya saing dan produktivitas UMKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan keterlibatan UMKM binaan Jakpreneur

dalam beberapa kegiatan bazaar mancanegara. Sebelum UMKM terpilih untuk mengikuti bazaar di luar negeri terlebih dahulu terdapat kurasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf). Keberhasilan UMKM binaan Jakpreneur dalam menembus pasar internasional menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan skala usaha di tingkat lokal, tetapi juga mendorong daya saing UMKM di kancah global. Melalui kurasi yang ketat, Jakpreneur mengirimkan tiga UMKM terpilih ke berbagai pameran dagang internasional seperti JA New York, Premiere Classe di Carrousel Du Louvre, Paris, Anuga Cologne di Jerman, ISEA Melbourne, L'Adresse Trade Showroom pada Paris Fashion Week 2023, Malaysia International Halal Showcase, INDEX Dubai, serta Fashion World Tokyo 2023 di Jepang. Sebagian besar UMKM yang terlibat berasal dari sektor fesyen, yang menunjukkan bahwa industri kreatif lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Keikutsertaan dalam pameran internasional ini menjadi peluang strategis bagi UMKM untuk memperluas jejaring bisnis, menjajaki potensi ekspor, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengarahkan kebijakan serta memperkuat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan kewirausahaan terpadu yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Jakpreneur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp47 Miliar untuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru di enam wilayah kota. Program ini juga diperkuat dengan kolaborasi

strategis bersama sembilan dinas terkait, platform e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, serta dukungan dari lembaga keuangan dan Bank DKI untuk akses permodalan. Selain itu, kerja sama dengan Netzme Kreasi Bangsa dalam penyediaan QRIS semakin memperkuat digitalisasi transaksi bagi UMKM binaan. Tidak hanya melibatkan pemerintah dan sektor swasta, komunitas penggerak UMKM juga turut berperan dalam memberikan pendampingan dan pengembangan usaha bagi pelaku wirausaha. Dengan ekosistem yang komprehensif ini, diharapkan UMKM di Jakarta mampu berkembang secara mandiri, memiliki daya saing tinggi, serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholishoh (2024) menemukan bahwa faktor penghambat UMKM dari sisi sumber daya manusia dan peran stakeholder belum berjalan dengan baik. Program pelatihan dan pembinaan Jakpreneur memang memberikan manfaat yang banyak. Namun, masih ditemukan permasalahan bahwa pihak Jakpreneur hanya berfokus pada peningkatan jumlah pendaftar namun tidak diiringi dengan pengembangan kualitas pelaku usaha, pendamping belum menjalankan perannya dengan maksimal karena terbagi dengan pekerjaan lain yang menyebabkan kurang masifnya penyebaran informasi mengenai sosialisasi, serta alur administrasi yang sejak awal menggunakan teknologi dirasa sulit bagi kalangan masyarakat tertentu. Namun demikian, berdasarkan kerangka yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pendamping berperan dalam melakukan sosialisasi, memfasilitasi koordinasi dan mentoring dalam rangkaian kegiatan 7

program Jakpreneur, menginput informasi peserta ke dalam sistem, dan memantau serta mengevaluasi perkembangan usaha peserta.

Selanjutnya, Anna Elizabeth Panjaitan (2023) menyoroti bahwa meskipun perencanaan Program Jakpreneur sudah disusun secara rasional dan terarah, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain terjadinya miskomunikasi antara suku dinas pengampu Jakpreneur dengan mitra kolaborator maupun para pelaku usaha, rendahnya kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program, serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi dan manfaat keterlibatan dalam program Jakpreneur. Selain itu, struktur birokrasi yang belum optimal juga menjadi kendala, distribusi tugas antar perangkat daerah masih tumpang tindih dan penempatan jabatan belum mempertimbangkan kompetensi dan tanggung jawab.

Sedangkan jika ditinjau dari penggunaan teknologi dalam program Jakpreneur, menurut M.E. Ruchmadiansyah¹ , Khikmatul Islah² (2024) mengungkapkan bahwa inovasi berupa website Jakpreneur yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kecamatan Cakung berjalan cukup efektif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sebagian anggota yang kurang terbiasa dengan teknologi, kesalahan dalam pengisian data, serta seringnya gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan masalah sinyal.

Di sisi lain keberhasilan program Jakpreneur juga dapat terlihat dari respons positif yang disampaikan oleh warganet di platform X. Banyak peserta membagikan

pengalaman mereka dalam mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan, mengungkapkan bahwa program ini memberikan manfaat nyata dalam pengembangan usaha mereka. Testimoni tersebut menunjukkan bahwa fasilitas serta kegiatan yang disediakan telah menjawab kebutuhan wirausaha pemula, terutama dalam hal pemasaran, digitalisasi, dan akses permodalan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan dari pemerintah dan mitra, tetapi juga pada kesiapan serta komitmen individu dalam memanfaatkan peluang yang diberikan. Pelaku usaha yang aktif mengikuti program secara konsisten cenderung memperoleh lebih banyak manfaat, baik dari segi peningkatan keterampilan, perluasan jaringan bisnis, maupun akses ke pasar yang lebih luas.

Melihat kelebihan dan permasalahan program Jakpreneur yang masih muncul dalam implementasinya menjadikan evaluasi program Jakpreneur dapat menjadi langkah strategis dalam memahami sejauh mana efektivitas program Jakpreneur dalam mencapai tujuannya. Sehingga masih perlu dikaji lebih mendalam melalui analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Sejauh mana program Jakpreneur mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya di Jakarta Selatan?

1.2 Identifikasi Masalah

Program Jakpreneur sebagai kebijakan pembangunan ekonomi lokal telah berjalan sejak 2020 dengan tujuan mendorong kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran. Berdasarkan berbagai laporan, kegiatan Jakpreneur kerap menunjukkan keberhasilan dalam membuka akses promosi seperti melalui bazar, pelatihan kewirausahaan, hingga peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Namun demikian, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi peserta program, diantaranya:

1. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara tingkat partisipasi pada tahap pendaftaran (401.738 partisipan) dengan tahap implementasi program. Hanya 243.628 partisipan (60,6%) yang melanjutkan ke tahap pelatihan, dan angka ini semakin menurun pada tahap pendampingan (223.828 partisipan).
2. Terdapat penurunan jumlah partisipan Jakpreneur sebesar 74,3% di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga hal ini mempertanyakan efektivitas program.
3. Berdasarkan penelitian terdahulu pendamping tidak menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebabkan kurang masifnya penyebaran informasi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi dari keberjalanan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi keberjalanan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berfokus pada kontribusi jangka panjang terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau teori yang relevan, sementara manfaat praktis memberikan dampak nyata dan langsung terhadap elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Adapun rincian manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik dan memperkaya literatur khususnya dalam evaluasi program pemerintah berbasis pemberdayaan UMKM. Serta

diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi pelaksana program sebagai bahan pertimbangan dalam melihat bagian mana yang sudah berjalan baik dan aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu pelaku UMKM memahami bagaimana mereka dapat memaksimalkan peluang yang tersedia dalam program serta menyesuaikan strategi usahanya agar lebih berkembang.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom et al. (2024) mengungkapkan melalui program RCEP, Jakpreneur berperan dalam mempersiapkan UMKM di DKI Jakarta untuk menghadapi tantangan di tingkat global. Penelitian ini menekankan pentingnya perlakuan khusus dalam perjanjian bagi negara berkembang, sekaligus menjelaskan bagaimana Jakpreneur membantu pelaku usaha lokal mengatasi berbagai kendala, seperti rendahnya daya saing, keterbatasan akses modal, serta infrastruktur yang kurang memadai. Di sisi lain, RCEP juga dianggap membuka peluang besar bagi UMKM, termasuk peningkatan akses pasar, perluasan kolaborasi global, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

Azkia Himayatu Dini (2022) meneliti implementasi Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok, dan menemukan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Salah satu temuan pentingnya adalah minimnya interaksi langsung antara pendamping dan UMKM, karena sebagian besar pendampingan hanya dilakukan lewat WhatsApp. Bahkan, para pelaksana program cenderung mengandalkan pengalaman pribadi tanpa mengacu pada SOP resmi, yang mengindikasikan lemahnya standarisasi pelaksanaan di tingkat lapangan.

Studi yang dilakukan oleh Qurtubi & Muhtadi (2024) menunjukkan bahwa pemberian bantuan permodalan melalui Program Jakpreneur di Kecamatan Pesangrahan berhasil memberikan dampak signifikan. Peningkatan omzet,

perluasan akses pasar, hingga keberlanjutan usaha menjadi indikator keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Penelitian oleh Kholisoh et al. (2024) mengulas pelaksanaan Program Jakpreneur di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Meski secara umum program berjalan baik, namun proses pelaksanaan masih belum maksimal akibat kurangnya sosialisasi, rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, keterbatasan akses modal, serta kapasitas pendamping yang belum memadai dalam hal pengalaman dan kompetensi teknis.

Ainaa Maulidya Zahra & Novie Indrawati Sagita (2023) turut mengevaluasi efektivitas Program Jakpreneur di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka menilai program ini telah menyediakan fasilitas usaha yang relevan, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya partisipasi anak muda, rendahnya ketekunan UMKM dalam mengikuti pelatihan hingga selesai, ketidakmampuan produk bersaing di pasar, serta ketergantungan pelaku UMKM terhadap sistem yang disediakan Jakpreneur dalam pengelolaan laporan keuangan.

Pramita et al. (2023) melalui kajiannya terhadap program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, menemukan berbagai hambatan. Terutama pada tahap pelatihan, pendampingan, permodalan, hingga pelaporan keuangan yang belum terstruktur dengan baik, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara menyeluruh.

Purnawan et al. (2022) mengevaluasi program pembinaan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah sejalan dengan tujuan instansi, dengan evaluasi mencakup aspek perencanaan, kualitas SDM aparatur, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Salah satu indikator positifnya adalah munculnya ide-ide baru dari pelaku UMKM yang menunjukkan hasil nyata dari proses pembinaan.

Isnatul Huda et al. (2024) yang berlokasi di Kelurahan Petemon, Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa implementasi program pemberdayaan UMKM belum berjalan optimal. Minimnya koordinasi antar instansi, kurangnya pelatihan dan bantuan modal, serta lemahnya pemantauan perkembangan usaha menjadi beberapa faktor penghambat utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI/TAHUN/JUDUL	TUJUAN	HASIL PENELITIAN
IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM			
1.	Yosua Saut Marulitua Gultom, Riesky Ramdhani Saefulloh, Azzahra Maharani/2024/ Jakpreneur Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mempersiapkan Ketahanan UMKM dalam Menghadapi RCEP	Untuk melihat bagaimana Jakpreneur berperan dalam menghadapi RCEP	-Perlu ada perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam RCEP serta peran Jakpreneur dalam memfasilitasi UMKM Jakarta. -Tantangan : Daya saing rendah, Akses pembiayaan terbatas, Infrastruktur kurang memadai -Peluang : Akses pasar luas, Kerja sama internasional, Pemanfaatan teknologi
2.	Azkia Himayatu Dini/2022. Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Priok.	Bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan dinas PPKUKM Kecamatan Tanjung Priok	-Implementasi program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok dalam pelaksanaannya belum maksimal - Dalam pelaksanaan pendampingan hanya dilakukan melalui whatsapp sehingga pendampingan tidak dilakukan secara detail -Para pelaksana program tidak berpedoman pada SOP, melainkan hanya menyesuaikan dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan sehari-hari.
3.	Muhammad Qurtubi, Muhtadi/2024. Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	Bertujuan untuk menganalisis efektivitas da hasil pemberdayaan UMKM melalui program permodalan Jakpreneur, khususnya di	-Program Jakpreneur terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM di Kecamatan Pesanggrahan -Fasilitas permodalan yang disediakan memberikan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan omzet,

		Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.	perluasan akses pasar, dan peningkatan keberlanjutan usaha.
4.	Hera Kholishoh, Budi Puspo Priyadi, Hartuti Purnaweni/2024. Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUMK Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur	-Pelaksanaan Program Jakpreneur sudah berjalan dengan baik - Proses kegiatan belum optimal karena sosialisasi kurang maksimal - Minimnya kualitas pelaku usaha - Keterbatasan modal - Pendamping yang kurang berpengalaman
5.	Ainaa Maulidya Zahra, Novie Indrawati Sagita/2023. Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara	Bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Jakarta Entrepreneur dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara	-Program Jakpreneur telah berjalan cukup baik melalui fasilitas yang ditawarkan. Namun, masih ditemukan tantangan yakni: - Minimnya minat anak muda untuk bergabung sebagai peserta program - Rendahnya tingkat penyelesaian pelatihan - Pelaku usaha dan produk UMKM Kecamatan Penjaringan belum memiliki daya saing yang kuat - Pelaku UMKM masih belum mandiri dan bergantung terhadap pendamping khususnya dalam pelaksanaan laporan keuangan
EVALUASI PROGRAM			
6.	Nabila Cahya Pramita, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo/2023. Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan	Untuk mengevaluasi keberjalanan program PKT di	-Terdapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan program, terutama dalam tahapan pelatihan,

	Terpadu (PKT) di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat	Jakarta Barat oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan.
7.	Rd. Ade Purnawan, Rifad Rahadian, Nurbudiwati/2022/Evaluasi Program Pembinaan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut	Untuk mengevaluasi program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Garut	- Program sudah sejalan dengan tujuan Dinas PUMKM - Evaluasi mencakup perencanaan program, SDM Aparatur, Sarana dan Fasilitas. - Muncul ide-ide baru yang menunjukkan bahwa hasil pembinaan sudah dapat dirasakan oleh PUMKM
8.	Isnatul Huda, Achluddin Ibnu Rochim, Indah Murti/2024/Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	Untuk mengevaluasi program pemberdayaan UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Petemon.	- Implementasi program belum optimal - Kurang koordinasi antar instansi terkait - Kurang pelatihan dan modal yang diberikan untuk UMKM - Kurang pemantauan pertumbuhan UMKM

Berdasarkan narasi penelitian terdahulu yang telah peneliti simpulkan, maka penelitian ini memiliki novelty atau perbedaan penelitian bahwa, sebagian besar kajian mengenai program Jakpreneur masih berfokus pada aspek tertentu seperti efektivitas permodalan, pelatihan, atau pendampingan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Program Jakpreneur di Jakarta Selatan. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi keberjalanan Program Jakpreneur dalam mencapai tujuannya dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

1.6.2 Kajian Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2019:3) administrasi publik adalah tindakan mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya dan personel publik dalam rangka mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan kebijakan publik. Kedua tokoh tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni yang bertujuan untuk mengelola urusan publik dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Selain itu, disiplin ilmu administrasi publik berupaya untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat melalui berbagai peningkatan atau modifikasi, khususnya dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, dan organisasi.

Menurut McCurdy dalam Keban (2019) administrasi publik dapat dipandang sebagai suatu proses politik, khususnya sebagai sarana tata kelola negara dan sebagai pendekatan yang bermoral baik untuk melaksanakan berbagai tugas negara. Dengan kata lain, administrasi publik merupakan masalah politik di samping masalah manajemen. Anggapan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai ruang lingkup dan definisi administrasi publik. Namun, pada kenyataannya, hal ini menunjukkan bagaimana administrasi publik masih terus berkembang dan betapa sulitnya membedakannya dari politik.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi telah mengalami beberapa siklus

perubahan sudut pandang, dengan paradigma yang memengaruhi cara memahaminya. Evolusi paradigma menunjukkan bagaimana tujuan, teori, dan metode, serta nilai-nilai yang mendasarinya, telah berubah dan berkembang.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Evolusi administrasi publik telah mengalami berbagai proses pergeseran paradigma dalam sudut pandang. Evolusi paradigma administrasi publik ini membantu menjelaskan pergeseran dan variasi dalam metode, nilai-nilai yang mendasarinya, keyakinan, dan tujuan. Dikotomi politik-administratif, prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik, dan administrasi publik sebagai administrasi publik adalah lima paradigma administrasi publik yang diusulkan Nicholas Henry berdasarkan fokusnya.

1. Paradigma I (1900-1926)

Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi menekankan adanya pemisahan yang tegas antara urusan politik dan urusan administrasi dalam fungsi pemerintahan. Dalam kerangka ini, ilmu politik difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan proses politik, penyusunan kebijakan, dan dinamika pemerintahan, sedangkan ilmu administrasi publik lebih diarahkan pada ranah teknis seperti pengelolaan organisasi, kepegawaian, serta penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam sistem birokrasi. Paradigma ini juga menyoroti pentingnya kontribusi ilmu manajemen dalam memperkuat administrasi publik agar mampu bersifat netral, efisien, dan berorientasi pada pendekatan yang ekonomis. Lebih lanjut, locus atau titik perhatian aktivitas politik dalam

paradigma ini berada pada lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki wewenang utama dalam merumuskan kebijakan. Sementara itu, locus administrasi publik berada pada lembaga eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan politik.

2. Paradigma II (1927-1937)

Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi menitikberatkan pada pentingnya focus dibandingkan locus, dengan asumsi bahwa administrasi publik memiliki sifat yang bersifat universal. Artinya, prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan variabel kontekstual seperti budaya organisasi, lingkungan sosial, misi institusi, ataupun struktur kelembagaan. Dalam pandangan ini, terdapat seperangkat prinsip yang dianggap fundamental dan menjadi fondasi bagi administrasi sebagai suatu disiplin ilmu. Sejumlah tokoh yang dikenal dalam pengembangan paradigma ini antara lain Willoughby, Henry Fayol, Mary Parker Follet, James Mooney dan Alan Reiley, Frederick Taylor, serta Luther Gulick dan Lyndall Urwick yang terkenal dengan gagasannya mengenai prinsip POSDCORB.

3. Paradigma III (1950-1937)

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik berfokus pada kembalinya eksistensi administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Karena pada dasarnya administrasi publik akan kembali mengabdikan pada kekuasaan dan memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan pengabdian dalam membantu penguasa dan memerintah secara lebih efisien. Locus dalam

paradigma ini yakni lingkungan birokrasi pemerintahan. Pendapat Morstein Marx yang mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi yang dinilai kurang realistis, kemudian didukung Herbert Simon yang mengkritik bahwa prinsip-prinsip tersebut dinilai kurang relevan untuk berlaku secara universal.

4. Paradigma IV (1956-1970)

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi tetap mempertahankan fokus sedangkan locus bukan menjadi suatu persyaratan. Prinsip ini menjadikan teknik-teknik ilmu manajemen, teori organisasi, dan pemanfaatan teknologi mulai dikembangkan sebagai bagian dari administrasi publik, dan seringkali memerlukan keahlian dan spesialisasi. Tetapi paradigma ini belum memperhatikan dimana dan pada institusi apa teknik-teknik ini akan diterapkan. Tokoh-tokoh administrasi publik yang dicatat termasuk dalam paradigma ini, antara lain Keith Henderson, James March dan Herbert Simon.

5. Paradigma V (1970-Saat ini)

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik merupakan bentuk pembaruan dari paradigma-paradigma sebelumnya dengan mengedepankan kejelasan baik dari segi *focus* maupun *locus*-nya. Dalam paradigma ini, fokus administrasi telah berkembang mencakup pembahasan mengenai teori-teori organisasi, perilaku organisasi, hingga proses pengambilan keputusan dalam konteks administrasi publik. Administrasi publik tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kegiatan teknis, melainkan juga sebagai disiplin yang berorientasi pada teori dan pendekatan manajerial modern, termasuk di dalamnya aspek politik-

ekonomi, serta metode dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik. Sementara itu, *locus* dari paradigma ini mengarah secara spesifik pada isu-isu publik dan kepentingan masyarakat luas sebagai orientasi utama dari praktik dan kajian administrasi publik.

Paradigma ini menawarkan berbagai teori, pemikiran, serta pendekatan yang berguna untuk memahami sekaligus mengembangkan alternatif pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ilmu administrasi publik, dengan fokus dan *locus* yang jelas. Berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan secara umum dapat dikategorikan ke dalam permasalahan kelembagaan, organisasi, sumber daya manusia, serta aspek manajerial. Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada aspek kebijakan publik, dengan *locus* yang berfokus pada masalah dan kepentingan publik. Oleh karena itu, paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik yang masih relevan hingga saat ini dianggap mendukung landasan teoritis penelitian ini dan memberikan pijakan konseptual yang kuat.

1.6.2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi laju pembangunan suatu negara. Sebagai upaya pemerintah untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan sebagai respons dan intervensi terhadap isu-isu publik. Menurut Nugroho (2012) semua negara pada hakikatnya menghadapi isu yang sama. Perbedaannya terletak pada cara pemerintah menanganinya, pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan publik. Kebesaran suatu negara saat ini dan masa depan akan ditentukan oleh kapasitas para pembuat kebijakannya untuk membuat, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan publik yang luar biasa.

Beberapa tokoh ahli kebijakan mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari kebijakan publik. Salah satu tokoh yang cukup terkenal di kalangan akademisi Indonesia ialah William Dunn. Menurut Dunn (2000) kebijakan publik merupakan jalinan rumit dari keputusan kelompok yang saling terkait dan dibuat oleh kantor atau lembaga pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak melakukan apapun. Kebijakan publik, menurut Dye (2016), adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, alasan di baliknya, dan hasil yang mengubah kehidupan bersama

Dari berbagai konsep kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah berdasarkan berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap masalah sosial yang ada dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Secara sederhana, kebijakan publik dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur kehidupan bersama sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Setiap kebijakan publik memiliki tujuan yang mendasari pembentukannya. Berdasarkan jenisnya, kebijakan publik memiliki berbagai macam tujuan. Nugroho (2012) menyebutkan beberapa tujuan pembentukan kebijakan publik, antara lain untuk menyerap sumber daya, mendistribusikan sumber daya, mengatur, membebaskan, menggerakkan sumber daya, mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat negara, maupun memperkuat pasar.

Sebagai sebuah proses, kebijakan terdiri dari beberapa tahapan. Para ahli mengemukakan berbagai versi terkait tahapan tersebut. Menurut Dunn (2000), proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian lima tahap yang saling terkait. Tahap pertama adalah penentuan agenda, yang kemudian berlanjut pada perumusan alternatif kebijakan. Setelah itu, pemerintah mengambil keputusan melalui tahap adopsi kebijakan, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan untuk menilai dampak serta keberhasilan kebijakan tersebut. Seluruh rangkaian ini berjalan secara berurutan dan membutuhkan pengelolaan serta pengawasan yang konsisten dari para perumus sekaligus pelaksana kebijakan.

Tahapan kebijakan publik yang serupa juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Dwijowijoto (2003), yang membagi proses kebijakan menjadi enam fase utama, yaitu: pertama, identifikasi masalah (*problem identification*); kedua, penetapan agenda (*agenda setting*); ketiga, perumusan kebijakan (*policy formulation*); keempat, pengesahan kebijakan (*policy legitimation*); kelima, pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*); dan keenam, evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Secara umum, proses kebijakan publik dapat disederhanakan menjadi tiga kegiatan utama, yakni perumusan kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pemilihan isu kebijakan yang mencerminkan masalah yang ingin diselesaikan atau tujuan yang hendak dicapai harus dipertimbangkan secara matang. Riant Nugroho (2012:185) menekankan bahwa isu kebijakan yang dipilih harus bersifat strategis, artinya bersifat mendasar,

menyangkut kepentingan banyak orang atau keselamatan bersama, memiliki cakupan jangka panjang, tidak dapat diselesaikan secara individual, dan mendesak untuk diselesaikan serta masuk dalam agenda politik.

Berdasarkan isu kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan publik yang relevan. Setelah kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu, tahap evaluasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

1.6.2.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi tahap pertama dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan; evaluasi ini bersifat sumatif dan formatif. Evaluasi tahap kedua dikenal sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi tahap ketiga dan keempat dikenal sebagai evaluasi dampak kebijakan.

Pendapat Peter H. Rossi dan Howard E. Freeman dalam Akbar & Mohi (2018) menyatakan bahwa “*evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs.*” Artinya, penelitian evaluasi merupakan penerapan prosedur penelitian sosial secara sistematis untuk menilai konseptualisasi, perancangan, pelaksanaan, dan kebermanfaatan dari program intervensi sosial.

Evaluasi kebijakan publik dipandang sebagai tahap akhir dalam analisis kebijakan untuk menilai apakah program atau kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan telah mencapai hasil yang diharapkan. William Dunn dalam

Suratman (2017:160-161) menyatakan bahwa evaluasi mencakup penaksiran, pemberian nilai, dan penilaian atas manfaat atau nilai hasil kebijakan. Evaluasi menjadi proses penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Parsons, yang dikutip oleh Anggara (2014:274) menekankan bahwa evaluasi kebijakan mencakup aktivitas menaksir, mengaudit, menilai, dan mengontrol kebijakan publik. Sementara itu, menurut Howlett, Ramesh, dan David Nachmias, evaluasi merupakan pemeriksaan objektif dan sistematis berdasarkan data empiris. Maka, evaluasi kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai proses sistematis untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu kebijakan, serta memberikan dasar informasi bagi perbaikan atau rekomendasi kebijakan di masa depan.

Menurut Dunn (2000) evaluasi kebijakan secara sederhana berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Lebih lanjut, mengemukakan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Yaitu :

1. Evaluasi Semu, yaitu pendekatan deskriptif yang bertujuan menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil kebijakan, namun tanpa mempertimbangkan nilai atau manfaat hasil tersebut bagi individu atau masyarakat. Kedua,
2. Evaluasi Formal, yaitu pendekatan deskriptif yang menilai hasil kebijakan berdasarkan pada sasaran program yang telah ditetapkan secara resmi oleh pembuat kebijakan. Ketiga,
3. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis, yakni pendekatan yang juga deskriptif, namun menilai hasil kebijakan berdasarkan tujuan yang secara eksplisit diharapkan oleh berbagai pihak berkepentingan (stakeholders).

Sebagai pembanding James P. Lester dan Joseph Steward Jr. dalam Nugroho (2012) membagi evaluasi implementasi kebijakan ke dalam tiga kategori: evaluasi proses, yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yang berkaitan dengan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan yang dimaksudkan; dan meta-evaluasi. Sementara itu, penilaian kebijakan publik diklasifikasikan ke dalam tiga kategori oleh James Anderson dalam Winarno (2012:168), kategori pertama adalah evaluasi kebijakan publik, yang dianggap sebagai kegiatan fungsional. Kedua, penilaian yang berkonsentrasi pada bagaimana kebijakan berfungsi. Ketiga evaluasi kebijakan sistematis, yang memeriksa program kebijakan secara objektif untuk mengukur dampak sosialnya dan sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah terpenuhi.

1.6.2.5 Evaluasi Program

Evaluasi kebijakan seringkali disamakan dengan evaluasi program. Meskipun saling berkaitan, keduanya adalah hal yang berbeda. Evaluasi Kebijakan menilai keseluruhan proses dan dampak kebijakan secara makro, sedangkan evaluasi program fokus pada pelaksanaan teknis dari program sebagai bagian dari kebijakan. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan, terdapat beberapa perbedaan yang meliputi:

1. Perbedaan pada tingkat analisis, tingkat sistem atau masyarakat untuk evaluasi kebijakan dan tingkat program untuk evaluasi program.
2. Kemampuan untuk mengidentifikasi komunitas pembanding yang setara mungkin lebih menantang dengan evaluasi kebijakan.

3. Perbedaan jenis dan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat.

Evaluasi program bertujuan untuk mengukur efektivitas, mengidentifikasi faktor penghambat maupun pendukung keberhasilan, serta memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, Prayogo (2011) menekankan evaluasi sebagai sarana menilai capaian dan menyempurnakan program ke depan. Evaluasi program adalah serangkaian aktivitas yang sengaja dilakukan untuk menilai seberapa berhasil suatu program yang telah direncanakan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut (Bahri et al., 2020)

Berdasarkan berbagai pendapat yang ada, evaluasi program dapat dipahami sebagai proses pengumpulan data dan informasi secara ilmiah yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan atau langkah selanjutnya untuk program di masa depan. Evaluasi ini mencakup upaya untuk memperoleh hasil atau manfaat, dan bisa diterapkan pada sebagian atau seluruh aspek pelaksanaan program. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6.2.6 Tujuan Evaluasi Program

Mengutip Mulyatiningsih (2015) evaluasi program memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menunjukkan kontribusi program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk pengembangan program serupa di lokasi lain.

2. Mengambil keputusan terkait kelangsungan program, apakah program tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Karena tujuannya adalah untuk mengetahui suatu kondisi, evaluasi program dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh sebab itu, dalam proses evaluasi program, pelaksana perlu memikirkan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Sebuah program harus selalu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas program tidak bisa diukur tanpa adanya evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah program tersebut akan diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan.

1.6.2.7 Manfaat Evaluasi Program

Kegiatan evaluasi sangat membantu bagi pengambilan keputusan dan kebijakan keberlanjutan. Karena para pengambil keputusan akan memanfaatkan hasil evaluasi program untuk menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Rekomendasi peneliti bagi para pengambil keputusan adalah berupa hasil evaluasi. Menurut Arikunto (2010) terdapat empat kemungkinan kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil keputusan suatu program. Yaitu:

- a. Menghentikan program karena dianggap tidak memberikan manfaat atau tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.
- b. Melakukan revisi terhadap program karena beberapa komponennya tidak sesuai harapan (terdapat beberapa kesalahan, tetapi kecil).

- c. Melanjutkan program; pelaksanaannya menunjukkan bahwa semuanya telah berjalan sesuai rencana dan menghasilkan hasil yang bermanfaat.
- d. Disimilasi atau penyebaran program (melaksanakan di tempat lain atau mengulangnya di lain waktu). Karena program tersebut berhasil, maka akan sangat baik apabila diulang di tempat lain dan pada periode yang berbeda.

1.6.2.8 Sasaran Evaluasi Program

Dalam menentukan sasaran evaluasi program, peneliti perlu memahami program secara mendalam, khususnya bagian-bagian komponennya. Evaluasi tidak hanya ditujukan pada program secara keseluruhan, melainkan pada komponen-komponen tertentu dari program tersebut. Tujuan umum program harus dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus agar fokus evaluasi lebih terarah pada komponen spesifik, sehingga pengamatan menjadi lebih detail dan data yang dikumpulkan lebih lengkap. Maka, peneliti harus mampu mengidentifikasi dengan tepat komponen program yang akan dievaluasi.

Untuk menganalisis program Jakpreneur, penelitian ini akan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn, yang menekankan pada evaluasi berbasis kriteria. Dunn dalam Nugroho (2012) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

1. Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

3. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok kelompok tertentu?
6. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Teori ini dipilih karena memberikan kerangka kerja komprehensif dalam menilai kinerja program, mulai dari proses implementasi hingga dampaknya terhadap penerima manfaat (UMKM).

1.6.2.9 Faktor dalam Keberhasilan Program

David C. Korten dalam Bahri et al. (2020) menggambarkan sebuah model yang melibatkan tiga elemen utama dalam pelaksanaan sebuah program, yaitu program itu sendiri, organisasi yang melaksanakan program, serta kelompok sasaran yang menjadi target program. Korten menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada kesesuaian ketiga elemen tersebut.

1. Kesesuaian program dengan pemanfaat

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dengan indikator sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan

2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana

Organisasi pelaksana harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas program. Dalam hal ini, sumber daya manusia sebagai pelaksana berperan penting dalam keberhasilan implementasi program.

3. Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana

Menurut (Korten, 1988), kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana juga harus terjaga agar hasil program dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran secara efektif

Dengan mempertimbangkan fokus penelitian ini yang tidak hanya mengevaluasi keberjalanan program tetapi juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, maka teori keberhasilan program dari David Korten dipandang relevan untuk digunakan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh adanya kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, antara program dengan organisasi pelaksana, serta antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Ketiga aspek ini menjadi dasar analisis dalam mengkaji faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program Jakpreneur di DKI Jakarta.

1.6.2.10 Organisasi Pelaksana

Menurut Robbins dalam Budihardjo (2014), mengemukakan bahwa organisasi sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Scott dalam Budihardjo

(2014), organisasi dipandang sebagai kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama demi kelangsungan hidup organisasi sebab itu mereka melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan bersama dalam organisasi dan membentuk suatu struktur informal. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai suatu sasaran dalam sistem dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya. Salah satu yang sangat penting yaitu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia senantiasa melekat pada setiap sumber daya organisasi apapun sebagai faktor penentu keberadaan dan peranan dalam memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.6.2.11 Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

Menurut Kwartono (2007), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, UMKM didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah perusahaan yang menghasilkan laba, yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan usaha mikro.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak atau cabang perusahaan lain, dengan modal usaha yang memiliki batas tertentu (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha), serta dimiliki oleh warga negara Indonesia.

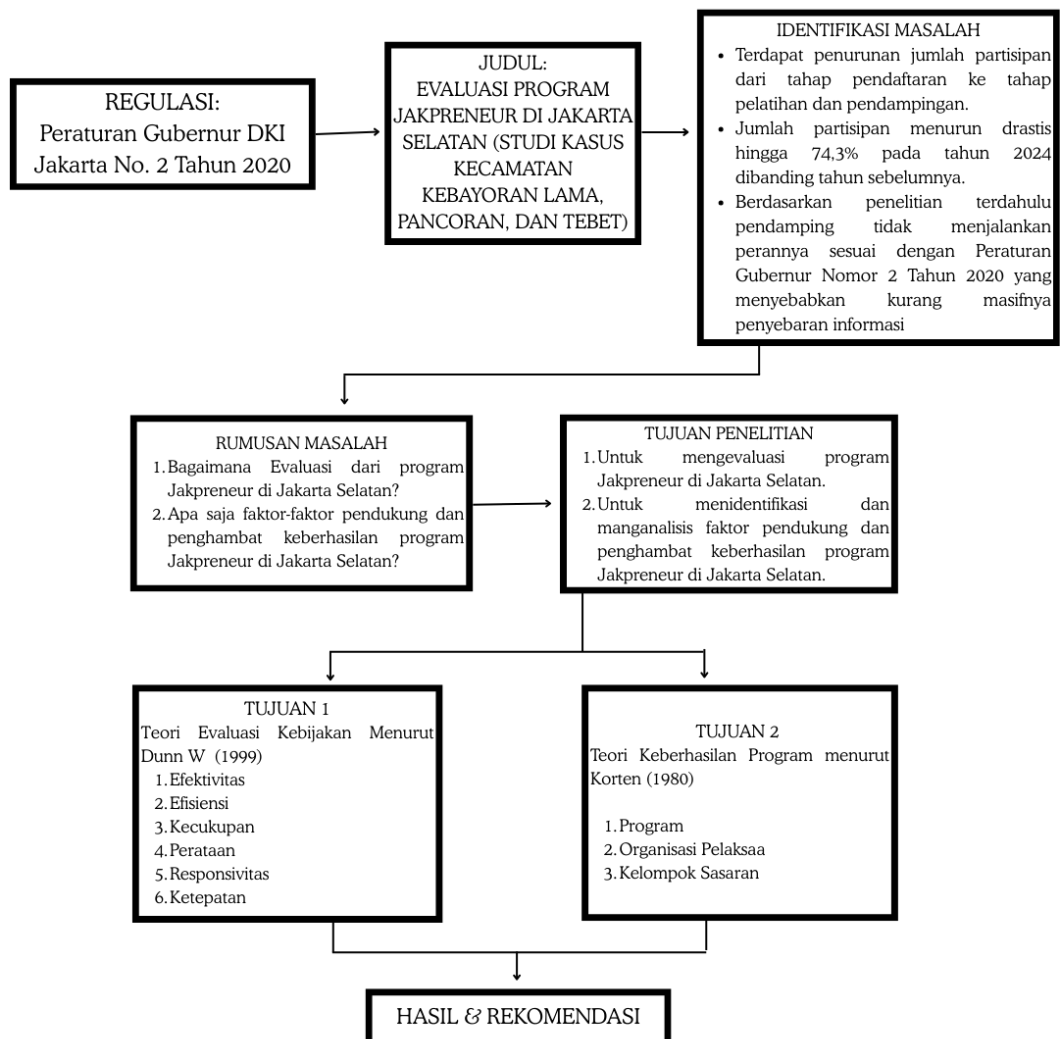
1.6.2.12 Program Jakarta Entrepreneur

Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui ekosistem kewirausahaan yang mencakup perusahaan rintisan, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan, inisiatif ini menyediakan platform untuk pembentukan, fasilitasi, dan kolaborasi UMKM. Para pengusaha Jakarta dapat terlibat dalam kolaborasi jangka panjang atau usaha lain yang berpotensi untuk menumbuhkan kemandirian dan ketajaman bisnis. Hingga Desember 2025 terdapat 416.694 peserta yang tergabung dan 298.773 jumlah usaha peserta Jakpreneur, sehingga mencapai target Pemprov DKI Jakarta sebanyak 200 ribu wirausaha baru melalui program Jakpreneur.

Program Jakpreneur berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan dari Pergub Nomor 12 Tahun 2018 mengatur program ini terkait Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Peserta PKT tidak lagi diharuskan mengikuti tahapan P1 sampai P7 secara berurutan, melainkan dapat langsung mengikuti program sesuai yang dibutuhkan. Melalui Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keleluasaan kepada para wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan

bagi individu binaan Jakpreneur. Fasilitas yang diberikan antara lain berupa pemasaran, akses permodalan, hingga pelatihan kewirausahaan.

1.7 Kerangka Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional merupakan penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

1.8.1 Evaluasi Program Jakarta Entrepreneur

Evaluasi terhadap program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) akan difokuskan pada enam indikator utama yang relevan dengan konteks pembinaan UMKM:

1. Efektivitas

Merujuk pada sejauh mana program Jakpreneur mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mendorong kemandirian pelaku usaha mikro dan menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini dapat dinilai dari :

- a. Sosialisasi dan Pemahaman tujuan program
- b. Aspek perkembangan UMKM berkat Program Jakpreneur
- c. Relevansi dan kualitas pelatihan
- d. Fasilitasi pemasaran dan akses pasar
- e. Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha

2. Efisiensi

Mengukur sejauh mana output program tercapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal, hal ini dapat dinilai dari :

- a. Perbandingan anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi
- b. Kendala birokrasi atau administrasi yang berdampak pada inefisiensi
- c. Penjadwalan Frekuensi pelaksanaan pelatihan dan bazar

3. Kecukupan

Menilai apakah hasil dari program cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ditargetkan, hal ini dapat dinilai dari :

- a. Perbandingan jumlah pendamping dengan peserta
- b. Kualifikasi dan beban kerja pendamping
- c. Kecukupan pemenuhan kebutuhan UMKM melalui program Jakpreneur

4. Perataan

Berkaitan dengan sejauh mana program dapat menjangkau seluruh wilayah administratif Jakarta Selatan secara adil, hal ini dapat dinilai dari :

- a. Jangkauan Jakpreneur Kecamatan terhadap kelompok usaha tertentu
- b. Partisipasi kelompok usia tertentu dan kendala dalam program Jakpreneur

5. Responsivitas

Mengukur seberapa besar kebijakan ini menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha, dengan menilai dari :

- a. Mekanisme dan jenis umpan balik peserta

- b. Alur Respon pelaksana program terhadap umpan balik peserta

6. Ketepatan

Mengukur relevansi program terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran, hal ini dapat dinilai dari :

- a. Ketepatan sasaran program dalam mendorong kemandirian UMKM
- b. Kesenjangan tujuan awal program dan realitas di lapangan

1.8.2 Faktor pendukung dan penghambat program Jakpreneur

Analisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program Jakpreneur dalam penelitian ini didasarkan pada tiga unsur kesesuaian, yaitu: kesesuaian antara program dengan kebutuhan kelompok sasaran (*beneficiaries*), kesesuaian antara program dengan kapasitas organisasi pelaksana (*implementing organization*), dan kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran (*linkage*). Ketiga unsur tersebut akan dianalisis untuk melihat apakah program Jakpreneur telah dirancang dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang ada.

1. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Kelompok Sasaran

Dimensi ini akan melihat sejauh mana program Jakpreneur relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini dapat dinilai dari :

- a. Kesesuaian materi pelatihan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta binaan
- b. Permasalahan UMKM sebelum mengikuti program
- c. Tingkat kepercayaan peserta terhadap program

2. Kesesuaian Program dengan Kapasitas Organisasi Pelaksana

Dimensi ini akan menganalisis apakah organisasi pelaksana, berkompeten dalam keberjalanan program, dengan menilai dari :

- a. Kompetensi pendamping dalam memberikan pelayanan
- b. Ketersediaan infrastruktur pendukung program
- c. Peran dan dukungan teknologi dalam keberjalanan program

3. Kesesuaian Organisasi Pelaksana dengan Kelompok Sasaran

Dimensi ini akan meninjau seberapa kuat hubungan dan koordinasi antara pelaksana program dan penerima manfaat, dengan menilai dari :

- a. Tingkat partisipasi peserta
- b. Wadah peserta untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi
- c. Pendekatan organisasi pelaksana dalam memahami kondisi usaha

UMKM

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Indikator	Gejala yang diamati
Evaluasi Program Jakpreneur	Efektivitas	Capaian program terhadap tujuan	Sosialisasi dan pemahaman tujuan program, Perkembangan kapasitas UMKM, Relevansi dan kualitas pelatihan, Fasilitasi pemasaran dan akses pasar, Kemandirian.
	Efisiensi	Perbandingan input dan output program	Perbandingan anggaran, Kendala administrasi yang berdampak pada inefisiensi, Frekuensi pelaksanaan kegiatan
	Kecukupan	Kecocokan hasil program dengan kebutuhan UMKM	Perbandingan jumlah pendamping dengan peserta, Kualifikasi dan beban kerja pendamping, Kecukupan pemenuhan kebutuhan UMKM
	Perataan	Persebaran partisipan antar wilayah DKI Jakarta	Target peserta di setiap kecamatan, Jangkauan program terhadap kelompok usaha tertentu, Partisipasi kelompok usia tertentu
	Responsivitas	Relevansi program terhadap kebutuhan pelaku usaha	Mekanisme dan jenis umpan balik, Alur respon pelaksana program
	Ketepatan	Kesesuaian sasaran program dengan masalah di lapangan	Relevansi program terhadap kebutuhan peserta, Kesenjangan tujuan awal dan realita program.
Faktor Pendukung dan Penghambat	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Kelompok Sasaran	Relevansi Program	Kesesuaian materi pelatihan dengan peserta, Permasalahan UMKM sebelum bergabung
		Tingkat kepercayaan dan responsivitas	Tingkat kepercayaan peserta terhadap program
	Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana	Kapasitas SDM Pelaksana	Kualifikasi dan kompetensi pendamping
		Sumber daya organisasi	Ketersediaan sarana prasarana dan teknologi
	Kesesuaian Organisasi dengan Kelompok Sasaran	Tingkat partisipasi	Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti program
		Hubungan dan koordinasi	Wadah menyampaikan keluhan/aspirasi, Pendekatan organisasi pelaksana dalam memahami kondisi usaha

Sumber : Diolah Penulis 2025

1.9 Argumentasi Penelitian

Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk memfasilitasi dan membina pelaku usaha dari segala aspek, baik pelaku usaha pemula maupun pelaku usaha naik kelas.

Secara kebermanfaatan, program ini dapat dikatakan optimal karena mampu menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi UMKM. Namun, apabila ditinjau dari kedalaman capaian terhadap tujuan program masih belum sepenuhnya selaras. Ketidakselarasan tersebut dilihat dari adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pendaftar dengan tahap implementasi program selanjutnya, serta adanya temuan penelitian bahwa pendamping belum menjalankan perannya secara maksimal.

Penelitian ini menggunakan teori William Dunn yang mengemukakan evaluasi berbasis kriteria. Terdapat indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui indikator ini akan penulis gunakan sebagai kerangka dalam menilai kinerja program hingga dampaknya terhadap penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi keberjalanan program dan memahami faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan program secara utuh.

1.10 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah metode pelaksanaan penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dan bahasa tertulis atau lisan. Sedangkan, tipe penelitian studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai program Jakpreneur di tingkat kecamatan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara rinci dinamika pelaksanaan program dan faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan Jakpreneur. Penelitian ini berfokus pada tiga kecamatan di Jakarta Selatan, yakni Kebayoran Lama, Pancoran, dan Tebet.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human instrument*. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. (Sugiyono, 2022)

1.10.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif, penelitian dengan metode eksplanatif bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi, atau menjawab pertanyaan “mengapa (*why*)”.

1.10.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menjangkau pelaksanaan Jakpreneur di Jakarta Selatan dan melibatkan UMKM yang telah/sedang mengikuti program Jakpreneur yang diselenggarakan oleh Dinas PPUKM. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena penelitian ini membutuhkan pandangan dari UMKM yang terlibat mengikuti seluruh rangkaian program Jakpreneur. Berikut merupakan rincian lokasi penelitian.

Tabel 1. 7 Lokasi Penelitian

No	Lokasi
1.	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan
2.	Jakpreneur Kecamatan Kebayoran Lama
3.	Jakpreneur Kecamatan Pancoran
4.	Jakpreneur Kecamatan Tebet

1.10.4 Subjek Penelitian

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan individu atau sekelompok orang yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti dan dijadikan sumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menentukan kriteria khusus terhadap subjek penelitian yang akan diteliti, dalam

hal ini adalah pelaku UMKM peserta Program Jakpreneur dengan rincian sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari program, penyelenggara program yakni Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kepala Satuan Pelaksana dan Pendamping Lapangan di tiap kecamatan karena mereka memiliki informasi tentang tujuan kebijakan, strategi pelaksanaan, serta kendala teknis program ini. Serta pendamping lapangan sebagai perantara program dengan peserta Jakpreneur.

Tabel 1. 8 Subjek Penelitian

No.	Lokasi	Subjek Penelitian
1.	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan	1. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah
2.	Jakpreneur Kebayoran Lama	1. Kepala Satuan Pelaksana Jakpreneur 2. Pendamping lapangan 3. Pelaku usaha/Peserta Jakpreneur
3.	Jakpreneur Pancoran	1. Pendamping lapangan 2. Pelaku usaha/Peserta Jakpreneur
4.	Jakpreneur Tebet	1. Kepala Satuan Pelaksana Jakpreneur 2. Pendamping lapangan 3. Pelaku usaha/Peserta Jakpreneur

1.10.5 Sumber Data

Menurut Arikunto (2010) sumber data merupakan subjek tempat data diperoleh. Sumber data dibedakan menjadi dua, yakni: pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi bersama sejumlah narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi laporan program Jakpreneur serta berbagai publikasi media yang memberitakan tentang pelaksanaan kegiatan Jakpreneur.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan dan wawancara mendalam (Sugiyono, 2022). Dengan melakukan wawancara peneliti dapat menggali informasi yang sedalam-dalamnya sehingga memperoleh keterangan secara mendalam dari objek penelitian.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti dengan narasumber, dengan bantuan pedoman pertanyaan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pelaku UMKM, dan organisasi pelaksana dalam hal ini Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kepala Satuan Pelaksana dan pendamping lapangan di tingkat kecamatan, untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan metode dalam penelitian non-tes, yang dilakukan melalui pengamatan secara sadar, jelas, rinci, dan menyeluruh terhadap perilaku individu dalam situasi tertentu. Observasi memiliki nilai penting karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor awal yang memengaruhi perilaku serta menggambarkan respons individu secara akurat dalam kondisi yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pelatihan dan bazar program Jakpreneur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian melibatkan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pemanfaatan berbagai sumber tertulis maupun visual dengan menghimpun, memilah, dan mengelola data berupa dokumen, arsip, foto kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian dan bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

1.10.7 Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data kualitatif berupa kumpulan kata-kata maka akan dilakukan analisis data yang akan diproses terlebih dahulu melalui pencatatan, pengetikan, atau penyuntingan dan kemudian disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan.

Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009) menyebutkan bahwa analisis data terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling terhubung merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, dan memilih hal-hal pokok, dan berfokus pada hal-hal yang penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Namun,

juga kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data menjadi komponen penting dalam proses pengolahan data penelitian. Kualitas ini menunjukkan seberapa akurat dan relevan data tersebut dengan subjek dan topik yang dikaji. Kualitas data juga ditentukan dengan keandalan dan ketepatan waktu pengumpulan data yang akan mendukung temuan dan analisis penelitian.

Salah satu metode yang digunakan peneliti untuk memastikan kredibilitas data adalah teknik triangulasi. Triangulasi sendiri dapat dimaknai sebagai pendekatan yang melibatkan berbagai sudut pandang, baik dari sisi sumber, metode, maupun waktu, dalam proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiyono (2022) triangulasi terbagi ke dalam tiga jenis.

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek kembali data dari berbagai narasumber dengan topik atau isu yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terdapat kesesuaian informasi antar sumber yang kemudian dapat dianalisis dan dirumuskan ke dalam kesimpulan yang utuh dan bermakna.

2. Triangulasi Teknik

Pengumpulan data dari sumber yang sama namun menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk menguji konsistensi dan menguatkan data yang telah diperoleh.

3. Triangulasi Waktu

Dilakukan dengan mengumpulkan data dalam waktu yang berbeda terhadap sumber yang sama. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh bersifat konsisten atau justru mengalami perubahan seiring waktu.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, mengingat fokus penelitian berada pada eksplorasi data dari berbagai pihak yang terlibat dalam Program Jakpreneur, seperti pelaku usaha, pendamping, dan pejabat pelaksana di tingkat suku dinas. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menggali keberagaman perspektif serta menemukan benang merah atas temuan yang diperoleh dari berbagai sudut pandang.